

# Reformasi Polri: Menilik Keberhasilan Program Presisi Polri

Edi Saputra Hasibuan

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya  
Email: [edi.hasibuan@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:edi.hasibuan@dsn.ubharajaya.ac.id)  
*\*Corresponding author*

## Article info

Received: Oct 17, 2023

Revised: Nov 27, 2023

Accepted: Nov 22, 2023

DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i3.3086>

**Abstract :** *Success is not something that can be said or can be achieved easily, there is a benchmark that makes something successful, so for the National Police of course this can be seen through the level of public satisfaction with their performance, changes in handling models, progress in the law enforcement system, and improvement in the quality of resources, as well as several other factors. The emergence of the Precision program by the Chief of the National Police General Listyo Sigit is an illustration and a real example that this institution continues to transform consistently towards a better direction, of course this is not an easy matter, because every effort will find obstacles in it, the existence of this Precision program also aims to make the performance of the National Police more optimal for the community, for that this research tries to highlight how this Precision program has a real impact on the community and The National Police themselves, of course, and see the results of a hard work in order to realize a humane civilian police.*

**Keywords :** *Success, Presisi, Indonesian Police*

**Abstrak :** Keberhasilan bukanlah suatu hal yang dapat diucapkan atau dapat dicapai dengan mudah, terdapat sebuah tolak ukur yang membuat suatu hal itu dikatakan berhasil, maka bagi Polri tentu hal ini dapat dilihat melalui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja mereka, perubahan model penanganan, kemajuan dalam sistem penegakkan hukum, dan peningkatan kualitas sumberdaya, serta beberapa faktor lainnya. Munculnya program Presisi oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit menjadi sebuah gambaran dan contoh nyata bahwa institusi ini terus bertransformasi secara konsisten menuju ke arah yang lebih baik, tentu hal ini bukanlah perkara mudah, karena setiap usaha akan menemukan rintangan di dalamnya, adanya program Presisi ini juga bertujuan agar kinerja Polri semakin optimal bagi masyarakat, untuk itu penelitian kali ini mencoba menyoroiti bagaimana program Presisi ini berdampak nyata bagi masyarakat dan Polri sendiri tentunya, serta melihat hasil dari sebuah kerja keras dalam rangka mewujudkan polisi sipil yang humanis.

**Kata kunci :** *Keberhasilan, Presisi, Polri*



## I. PENDAHULUAN

Pada tanggal 27 Januari 2021 yang lalu, Komjen Listyo Sigit resmi dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), ia merupakan salah satu putera terbaik bangsa yang telah mengabdikan diri ke kepolisian semenjak ia lulus dari Akademi Kepolisian pada tahun 1991, dilantikannya Jenderal Listyo Sigit menjadi Kapolri tertuang dalam surat Keputusan Presiden No.5 tahun 2021 tentang Pengangkatan Kepala Kepolisian RI, pelantikan ini dilakukan dalam kondisi negara sedang dilanda pandemi, yaitu tersebarnya virus Covid-19.<sup>1</sup>

Berada dalam jabatan yang tinggi dan paling terhormat di lingkungan Polri bukanlah hal yang mudah, banyak pekerjaan rumah dan tantangan yang begitu berat sudah menanti untuk dikerjakan dan diselesaikan satu per satu, apalagi bila melihat ke belakang, pada tahun 2021 seluruh dunia termasuk Indonesia sedang dalam badai pandemi covid, tugas dari Kapolri Jenderal Listyo sangatlah berat, banyaknya protes dari warga mengenai kebebasan mereka yang terbatas oleh karena lock down yang dicanangkan oleh pemerintah membuat Polri menjadi sasaran empuk, karena institusi ini menjadi salah satu yang terdepan dalam menjaga situasi dan kondisi tetap aman, oleh karena itu faktor kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri agak sedikit goyah, padahal di sisi lain Polri hanya menjalankan tugas untuk memastikan situasi kondusif dan tidak ada kerumunan massa yang dapat menyebabkan penyebaran virus, pun juga dari sisi masyarakat, mereka hanya ingin mencari nafkah, situasi yang sangat dilematis dan sulit tentunya.

Melihat situasi dan kondisi tersebut rasanya siapapun akan sepakat bahwa memimpin institusi Polri adalah merupakan tugas yang berat, namun tugas dan amanah tetaplah sebuah tanggung jawab, sebagai seorang anggota Polri yang dilatih untuk selalu siap, maka Jenderal Listyo Sigit menghadapi tantangan tersebut dengan beberapa program yang ia unggulkan sebagai seorang Kapolri, pada saat sebelum dilantik Jenderal Listyo memaparkan beberapa program yang akan ia jalankan dalam rangka memimpin dan mendukung transformasi Polri, yaitu:<sup>2</sup>

- a. Penataan Kelembagaan
- b. Perubahan Sistem dan Metode Organisasi
- c. Menjadikan SDM Polri yang Unggul di Era Police 4.0
- d. Perubahan Teknologi Kepolisian Modern di Era Police 4.0
- e. Pemantapan Kinerja Pemeliharaan Kamtibmas
- f. Pemantapan Dukungan Polri Dalam Penanganan Covid-19
- g. Menjamin Keamanan Program Prioritas Nasional
- h. Pemulihan Ekonomi Nasional
- i. Meningkatkan Kinerja Penegakkan Hukum
- j. Penguatan Penanganan Konflik Nasional
- k. Terwujudnya Pelayanan Publik Polri yang Berintegritas
- l. Penguatan Komunikasi Publik
- m. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

---

<sup>1</sup> Diakses dari CNN, dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210127061723-12-598817/listyo-sigit-prabowo-resmi-dilantik-jadi-kapolri> pada 30 Mei 2023

<sup>2</sup> Diakses dari Polri.go.id pada 30 Mei 2023

- n. Penguatan Fungsi Pengawasan
- o. Pengawasan Pimpinan Dalam Semua Kegiatan
- p. Pengawasan Oleh Masyarakat Pencari Keadilan

Program Kapolri Listyo Sigit ini kemudian dikenal dengan jargon PRESISI yang berarti prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, semua bahan kerja dan cita-cita dari Jenderal Listyo Sigit ini kemudian dikemas dan disiapkan untuk dipaparkan dalam uji kelayakan (fit and proper test) yang harus ia jalani di DPR, dan hasilnya tentu sangat memuaskan dan membawa beliau menjabat Kapolri hingga tulisan ini dibuat.

Sudah 2 tahun berselang dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit menjadi Kapolri dan program PRESISI ini diberlakukan, lalu apa dampak yang dihasilkan? Apakah program presisi ini sudah tepat dalam rangka mewujudkan perubahan di tubuh Polri? Tulisan ini mencoba menyoroti beberapa poin penting yang menjadi tonggak keberhasilan program PRESISI, dan tentunya di saat yang bersamaan ketika program ini dijalankan, Polri juga dihamtam badai oleh karena beberapa kasus yang terjadi di dalamnya, selain itu tulisan ini akan melihat seberapa besar efek program Presisi berdampak pada kepuasan masyarakat terhadap Polri.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian akan dilakukan secara normative, melalui telaah pada setiap informasi, aturan, juga implementasi, serta selanjutnya akan digabungkan dengan studi kepustakaan juga studi terhadap literatur melalui analisis terhadap jurnal, buku, media cetak, juga berita online yang berkaitan dengan pencapaian program PRESISI. Tulisan ini juga akan melihat beberapa data yang berkaitan dengan tingkat kepuasan masyarakat, dan dampak oleh institusi Polri. Target data yang dituju adalah berhubungan dengan tingkat kepercayaan publik pada Polri, dan bagaimana penerapan program PRESISI hingga saat ini.

## III. PEMBAHASAN

### Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Dan Transparansi Berkeadilan)

#### 1. Prediktif

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, kondisi ketika dilantiknya Kapolri Jenderal Listyo Sigit, adalah sebuah kondisi dimana negara sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, oleh karena penyebaran virus Covid-19 maka terdapat sebuah kebijakan baru, dan kondisi yang baru, seluruh lapisan masyarakat harus dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan keadaan new normal, dari sini kemudian sudah dapat ditebak siapa pihak yang nantinya akan menjadi garda terdepan dalam mengawal perubahan ini, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia yang didukung oleh seluruh lapisan organisasi, badan, dan lembaga lainnya.

Pada saat pemberlakuan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) masyarakat dilarang untuk melakukan kegiatan di luar rumah dalam waktu yang lama, apalagi melakukan kegiatan yang menimbulkan kerumunan, Polri pun diberikan kewenangan

untuk menindak dan membubarkan kerumunan yang ada, di sisi lain masyarakat pun protes karena banyak pintu pencaharian mereka yang tertutup oleh karena pembatasan tersebut, di posisi seperti ini tentu Polri harus dapat bertindak dan memposisikan diri agar tidak terjadi gesekan dengan masyarakat yang terlalu besar, kondisi ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bittner, bahwa tugas polisi bersifat juga *weaving line* (bergelombang), yang di suatu kondisi akan lebih mengutamakan ketertiban, namun dalam keadaan tertentu akan mengedepankan hukum.<sup>3</sup>

Keadaan yang sulit dan penuh tantangan tersebut, biasanya membutuhkan keputusan langsung (*real time*) yang tandanya hal ini tidak mungkin dibuat aturan langsung terhadap masalah yang baru ditemui, ataupun juga menunggu komando dari atasan agar membuat keputusan terhadap kondisi di masyarakat, tetapi penanganannya adalah lebih mengarah kepada interpretasi anggota di lapangan terhadap masalah kongkrit yang dihadapi,<sup>4</sup> dari sinilah kemudian dapat dilihat betapa pentingnya peningkatan sumber daya dalam tubuh Polri di era modern, sebagai seorang anggota Polri maka harus dapat memiliki kemampuan yang prediktif dalam menangani situasi langsung di lapangan, poin yang menjadi acuan adalah,<sup>5</sup>

- a. Mengedepankan tindakan pre-emptif juga preventif sebelum menggunakan tindakan tegas (represif);
- b. Tidak menunggu suatu masalah menjadi isu kehebohan, atau viral baru direspon, melainkan harus segera direspon, diatasi, dan tidak berbelit-belit;
- c. Memiliki *sense of crisis* yang berarti peka atau bersifat pro aktif, menanggapi perubahan situasi, ancaman, dan keresahan yang timbul di masyarakat.

Beberapa point di atas, ditanggapi melalui Peraturan Kapolri yang diwujudkan dengan adanya pelatihan dan manajemen pembinaan SDM polri yang berkeunggulan, ini merupakan suatu rangkaian kegiatan yang diselenggarakan secara sistematis dan integrative dengan proses perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, serta pelaksanaan, dalam pembinaan SDM Polri yang unggul, ini juga menjadi batasan ukuran atau pedoman dalam menentukan suatu keberhasilan SDM Polri yang dapat mewujudkan tingkat produktifitas kinerja.<sup>6</sup> Perkap yang sudah ada sejak tahun 2020 ini terus dikokohkan dan didukung dalam rangka mewujudkan SDM yang lebih baik dari sebelumnya, lebih optimal, dan lebih mampu dalam menghadapi situasi di lapangan, sehingga faktor prediktif dapat terwujud secara bertahap.

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah memberikan akreditasi peringkat A kepada Biro Pembinaan Karier Staff Sumber Daya Manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia, pemberian predikat ini dilakukan dengan menilai 3 (tiga) unsur penting yaitu organisasi, SDM, dan metode pelaksanaan penilaian kompetensi, penilaian yang diselenggarakan pada tahun 2022 ini diikuti oleh 12 (dua belas)

<sup>3</sup> Bittner, Egon, "*The Functions of the Police in Modern Society*", Cambridge-Mass, Olges Chlager, Gunn & Hain, 1980, hal.23

<sup>4</sup> Chrysnanda DL, "*Bentuk-bentuk Pemolisian di Polres Batang*", Disertasi Program Doktor Ilmu Kepolisian UI, 2005

<sup>5</sup> Kepolisian Republik Indonesia, "*Polri Yang Dapat Dipercaya Masyarakat*", Paparan Polisi Presisi

<sup>6</sup> Peraturan Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia No.99 tahun 2020

lembaga, dari total instansi yang ikut seleksi terdapat dua diantaranya yang tidak lolos, sedangkan sepuluh lainnya lolos uji kompetensi, termasuk Polri di dalamnya.<sup>7</sup>

## 2. Responsibilitas

Pada bagian ini kita akan mengarah kepada tingkat responsibilitas anggota Polri, program PRESISI yang satu ini memiliki beberapa poin penting yaitu:

- a. Mengerti dan memahami tugas tanggung jawab
- b. Menjaga Marwah dari institusi (tidak ada penyimpangan)
- c. Menggunakan wewenang dengan tanggung jawab, atau dapat dipertanggung jawabkan
- d. Menjalani tugas tanpa pamrih, dengan menanamkan nilai bahwa tugas adalah ibadah
- e. Meningkatkan pelayanan dengan prima
- f. Hadir dalam setiap permasalahan yang ada di masyarakat

Sebagai abdi negara yang sudah jelas memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melindungi segenap warga negara, melakukan penegakkan hukum, dan mengayomi masyarakat maka Polri diingatkan kembali untuk terus memperbaiki sistem pelayanan mereka, maka hal ini coba untuk ditingkatkan melalui pembentukan sistem pengaduan terpadu, konsep ini memasukkan semua pengaduan dalam satu database, sehingga semua pengaduan yang masuk dapat dicek dan segera dilakukan penanganan, terdapat petugas admin desk yang nantinya menanggapi aduan dari berbagai saluran pengaduan Polri baik dari nomor pengaduan (WA), aplikasi Dumas PRESISI, dan Propam PRESISI, serta berbagai macam media sosial, setiap media sosial terdapat akun resmi Polri, baik dari Polda juga akun Humas Polri semua akun ini bertugas selama 1X24 jam.<sup>8</sup>

Setelah itu, dalam rangka memudahkan pelayanan terhadap masyarakat, juga mendukung dan mengikuti perubahan jaman maka Polri membangun sistem pelayanan berbasis online atau berbasis IT, hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat menggapai pelayanan Polri dengan mudah dan mengurangi interaksi dengan petugas secara langsung, sehingga ruang untuk penyimpangan melalui pungli, gratifikasi, dan lainnya dapat ditutup sedemikian rupa, bentuk aplikasi tersebut antara lain:

- a. Body worm;
- b. SINAR;
- c. Samsat Digital Online;
- d. SP2HP Online;
- e. ETLE;
- f. PolisiKu;

---

<sup>7</sup> Diakses dari bkn.go.id dalam <https://www.bkn.go.id/bkn-serahkan-akreditasi-pada-10-lembaga-penyelenggara-penilaian-kompetensi-instansi-pemerintah/> diakses pada 1 Juni 2023

<sup>8</sup> Op.Cit. Kepolisian Republik Indonesia, “Polri Yang Dapat Dipercaya Masyarakat”, Paparan Polisi Presisi

- g. Nomor tunggal 110;
- h. E-PZI;
- i. SKCK Online;
- j. Polisi Siber;
- k. E-Rikkes;
- l. Ujian Teori Sim Online, dan;
- m. Propam PRESISI.

Penulis sepakat bahwa memang perlu adanya sebuah terobosan dalam menyokong dan menanamkan sifat tanggung jawab terhadap para anggota Polri, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Chairuddin Ismail bahwa polisi itu memang memiliki segala macam kewenangan (power) yang dapat memaksa dan mengurangi hak-hak seorang warga negara, atas nama hukum, hal ini tentu harus dipertanggung jawabkan kepada publik, karena selain kekuasaan itu cenderung dapat menyimpang, masyarakat sebagai sebuah entitas yang berdaulat harus memiliki kontrol terhadap penerapan kekuasaan pemerintahannya.<sup>9</sup>

### 3. Transparansi Berkeadilan

Salah satu kasus yang masih hangat dalam ingatan yaitu Pada tahun 2022 yang lalu, institusi Polri harus tercoreng dengan kasus penembakan antar sesama anggota, Ferdy Sambo seorang Kepala Divisi Propam Polri melakukan tindak pidana dengan memerintahkan salah satu anggotanya untuk menembak seorang anggota lain yang juga merupakan bawahannya adanya masalah pribadi sang jenderal dengan bawahannya tersebut menjadi faktor terjadinya kejadian memilukan ini. Ferdy Sambo sendiri diduga ikut memberikan tembakan yang akhirnya menimbulkan kematian pada Brigadir Joshua, sampai saat tulisan ini dibuat, kasus penembakan dan penyalahgunaan senjata oleh mantan anggota polisi ini sudah diputuskan oleh pengadilan bahwa ia bersalah dan harus menjalani hukuman mati, walaupun pihak dari Ferdy Sambo sedang mengajukan banding.<sup>10</sup>

Selanjutnya adalah kasus narkoba yang melibatkan seorang perwira tinggi Polri yang sudah mengikuti persidangan dan divonis seumur hidup, yaitu Teddy Minahasa. Seorang jenderal bintang dua yang justru melakukan penyimpangan dengan melakukan penggelapan terhadap barang bukti narkoba, dan lalu mengedarkan kembali barang tersebut untuk dijual, Pada tahun 2022 yang lalu Teddy Minahasa ditangkap oleh karena dugaan menyimpan barang bukti hasil tangkapan tanpa izin, dan lalu memperjualbelikan narkoba yang beratnya sekitar 5 kg kembali kepada masyarakat bersama dengan anak buahnya. Isi barang bukti sabu itu telah diganti dengan tawas.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Chairuddin Ismail, “*Polisi Sipil dan Paradigma Baru Polri?*”, Jakarta: Merlyn Press, 2009, hal.64

<sup>10</sup> Diakses dari CNN, dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230412071816-12-936528/vonis-sidang-banding-ferdy-sambo-tetap-dihukum-mati> pada 1 Juni 2023

<sup>11</sup> Diakses dari Tirto, dalam <https://tirto.id/mengurai-lingkaran-setan-kasus-narkoba-yang-melibatkan-polisi-gCHt> pada 1 Juni 2023, Lihat Pula: CNN dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230512151450-12-948808/jaksa-resmi-banding-vonis-seumur-hidup-penjara-irjen-teddy-minahasa> diakses pada 1 Juni 2023

Kedua kasus di atas terjadi di waktu yang tidak berselang lama, kedua kasus ini pun juga seakan-akan telah menghancurkan kehormatan dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri, dua jenderal bintang dua yang seharusnya menjadi matahari penyinar bagi Polri justru harus menodai institusi mereka sendiri, sangat berat memang mengingat perjuangan yang dilakukan untuk menjaga marwah institusi begitu berat dan panjang.

Aturan adalah sesuatu yang tegas, hukum harus ditegakkan, begitulah yang dilakukan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit, sebagai sebuah pemimpin dan dalam perjuangannya mewujudkan citra Polri yang transparan dan adil maka, kedua kasus ini dibuka secara umum dan tidak ada yang ditutup-tutupi, sekalipun terdapat personel Polri yang terlibat, atau bahkan menjadi pelaku kejahatan, namun asas *equality before the law* harus ditegakkan, yaitu semua warga negara adalah sama kedudukannya di hadapan hukum, dan sebagai penegak hukum Polri seharusnya menjadi contoh utama.

Menggunakan pendekatan *scientific crime investigation* Polri menangani kasus di atas dengan memberikan komitmen bahwa tidak ada toleransi bagi personel Polri yang melakukan tindak pidana, Kapolri juga menegaskan agar “potong kepala” apabila pemimpinnya tidak bisa mengayomi yang di bawah, berikut ini adalah poin yang menjadi acuan dalam menegakkan transparansi berkeadilan:<sup>12</sup>

- a. Siap diawasi, sesuai prosedur;
- b. Membuka saluran komunikasi dan sarana pengaduan kepada pelapor maupun terlapor terkait perkembangan suatu perkara;
- c. Penegakkan hukum yang memenuhi rasa keadilan, salah satunya adalah dengan menerapkan *restorative justice*;
- d. Tegas dan tidak ragu dalam membela yang benar, dan memberantas kejahatan;
- e. Jangan menghindari pertanyaan mengenai perkembangan kasus, jelaskan sesuai fakta hukum yang ada;
- f. Tidak membedakan kasus, standar pelayanan harus sama;
- g. Memberikan solusi terhadap permasalahan masyarakat;
- h. Mematuhi administrasi penyidikan dengan baik.

Selanjutnya dalam menekan terjadinya pelanggaran dan memberikan transparansi secara maksimal maka Polri melakukan nota kesepahaman dengan 9 pengawas eksternal yaitu Komnas Ham, Ombudsman RI, Kemsetneg RI, Kemenpolhukam, KPK, BPK RI, BPKP, dan LKPP. Tujuannya adalah meningkatkan implementasi penanganan Dumas melalui Dumas PRESISI, aplikasi Dumas PRESISI ini terhubung dengan dashboard E-Office Kopolnas (Komisi Pengawas Kepolisian), juga terintegrasi dengan Sistem Pengelolaan Pengaduan dan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) milik dari KemenPan RB.

Melalui paparan di atas dapat dilihat bahwa adanya tujuan yang pasti dalam melakukan perubahan (transformasi) di tubuh Polri, bukan hanya isapan jempol semata namun program PRESISI dijabarkan dan dilakukan dengan tindakan nyata melalui pembentukan sistem, transparansi, dan bahkan sampai pembentukan aturan, poin-poin

---

<sup>12</sup> Op.Cit Kepolisian Republik Indonesia, “Polri Yang Dapat Dipercaya Masyarakat”, Paparan Polisi Presisi

yang disampaikan dalam setiap program juga terpapar jelas, walaupun badai menghantam Polri melalui perilaku oknum dalam tubuh mereka sendiri, namun itu sekiranya dapat dijadikan ajang untuk melakukan pembuktian lebih terhadap apa yang ingin dicapai Polri.

### **Dampak Program Presisi Dalam Meningkatkan Pelayanan Dan Kepuasan Masyarakat**

Keberhasilan harus selalu mempunyai tolak ukur, dan dalam hal ini bagaimana kita mengatakan bahwa program PRESISI telah menjadi salah satu dongrak kepercayaan masyarakat terhadap Polri? Hal ini tentu harus dilihat dari tren kepercayaan masyarakat, dapat melalui data yang dikumpulkan oleh lembaga survei, baik dari internal Polri sendiri yang melakukan survei, maupun dari stakeholder lain yang turut melakukan survei terhadap tingkat kepercayaan masyarakat, oleh karena itu, pada bagian ini penulis akan mencoba menyajikan beberapa data yang dapat dilihat dan dinilai sebagai sebuah informasi untuk dapat melihat hasil kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Pada tahun awal tahun 2022 atau setahun setelah program ini berjalan sejak Kapolri Listyo Sigit diangkat, lembaga survei Charta Politica melakukan survei terhadap tingkat kepuasan masyarakat terhadap Polri, hasilnya adalah di angka 62,4 persen, menurut keterangan dari Komjen Gatot Eddy Pramono hal ini disebabkan oleh adanya program *quick wins presisi* yang terus dilakukan sehingga ada peningkatan kepercayaan pada Polri meski sekalipun belum mencapai target di angka 65 persen, oleh karena itu maka kerja keras dalam mengerjakan tugas dan memenuhi keinginan masyarakat masih sangat panjang.<sup>13</sup>

Beranjak ke pertengahan tahun 2022 sampai kepada penghujung tahun 2022, kita mengetahui bahwa Polri saat itu sedang dalam kondisi yang sangat berat, institusi negara satu ini harus menghadapi kenyataan bahwa perilaku oknum anggota yang berada dalam tubuh mereka, telah menghancurkan dan menggerogoti kepercayaan masyarakat, kasus Ferdy Sambo, kasus Kanjuruhan, dan terakhir kasus Teddy Minahasa menjadi sebuah pecut keras yang menimbulkan hantaman terhadap posisi Polri sebagai institusi penegak hukum, hasilnya adalah kepercayaan masyarakat turun anjlok di angka 60,98 persen saja, sehingga hal ini membuat Polri harus kembali bekerja keras dan akhirnya memberikan layanan terbaik melalui program yang mereka punya, hasilnya menunjukkan angka yang positif, di penghujung tahun 2022, tingkat kepercayaan masyarakat perlahan pulih kembali, ini terlihat di angka 69,35 persen, adanya peningkatan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti naiknya kepercayaan masyarakat kepada Presiden Joko Widodo, yang akhirnya berdampak kepada semua instansi dan lembaga negara lainnya, selanjutnya disebabkan oleh program *quick wins presisi* sebagai intervensi kebijakan Polri yang membuat kinerja anggota semakin efektif untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Diakses dari Detik, Dalam <https://news.detik.com/berita/d-6483348/polri-program-quick-wins-presisi-polri-tercapai-kepercayaan-publik-naik> pada 2 Juni 2023

<sup>14</sup> Survei ini dilakukan oleh Indonesia Political Survey (Indopol) yang dirangkum oleh Polri.go.id dalam <https://resbuleleng.bali.polri.go.id/survei-indopol-tingkat-kepercayaan-polri-meningkat-jadi-69-35-persen/> diakses pada tanggal 3 Juni 2023

Terakhir, update posisi kepercayaan masyarakat terhadap Polri sampai pada Mei 2023 telah berada di angka 73,2 persen, angka ini didapatkan oleh lembaga Indikator Politik Indonesia, dalam paparannya yang bertajuk “Korelasi Antara Approval Rating Presiden dan Dukungan Terhadap Calon Presiden dan Partai Politik Jelang 2024”, hasil meningkatnya kepercayaan masyarakat tersebut disebabkan oleh karena sebagian besar masyarakat yang mengetahui adanya Posko Presisi di Mabes Polri, merasakan adanya Langkah yang nyata dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, juga ini dipercaya mampu untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan akurat dan cepat, metode yang dipakai dalam melaksanakan survei ini adalah *simple random sampling* dengan target sasaran di angka 1.220 orang.<sup>15</sup>

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, dapat dilihat bahwa Polri telah berusaha keras mewujudkan transformasi dengan lebih maksimal, adanya program PRESISI dapat dijadikan suatu landasan pacu untuk mendorong perubahan pada seluruh jajaran, satu per satu program yang telah penulis uraikan di atas dapat menjadi gambaran dan pemahaman terkait mekanisme program PRESISI ini berjalan, serta contoh konkritnya di lapangan, dengan banyaknya kerjasama yang dilakukan oleh Polri yang menggandeng beberapa stakeholder untuk bekerja sama, menunjukkan bahwa Polri tidak dapat bekerja sendiri, ia perlu dukungan dari berbagai pihak, terutama dari seluruh masyarakat yang menjadi alasan bagi Polri untuk terus berbenah.

Berjalannya program PRESISI ini memang perlu diapresiasi, bukti bahwa kepercayaan masyarakat yang secara perlahan meningkat, menunjukkan bahwa program ini benar-benar berjalan, namun hal itu tentu tidak boleh membuat Polri larut dalam kesuksesan, kejadian memilukan kasus Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa masih menjadi catatan penting dan pengingat bahwa dalam sebuah program yang hebat pun masih dapat dilakukan penyimpangan, tantangan ke depan adalah bagaimana proses atau implementasi program PRESISI ini dapat menjalar secara merata ke seluruh Polda, Polres, dan Polsek seluruh Indonesia, sehingga masyarakat dapat merasakan dampak dari program ini secara maksimal, dan dapat menimbulkan kepercayaan yang semakin meningkat lagi, Polri adalah institusi yang paling dipercaya dalam menjaga keamanan, untuk itu diperlukan sebuah pengorbanan besar dalam prosesnya, maka alangkah baiknya bahwa program yang sudah ada dapat diterapkan dengan maksimal sehingga terwujud suatu harmonisasi dan keberlangsungan hidup yang baik dalam suatu negara.

---

<sup>15</sup> Diakses dari Tempo, dalam <https://nasional.tempo.co/read/1720486/survei-indikator-politik-indonesia-sebut-tingkat-kepercayaan-publik-terhadap-polri-naik-jadi-732-persen> pada 2 Juni 2023

## DAFTAR PUSTAKA

- Bittner, Egon, 1980, *“The Functions of the Police in Modern Society”*, Cambridge-Mass, Olges Chlager, Gunn & Hain, 1980,
- DL, Chrysnanda , 2005, *“Bentuk-bentuk Pemolisian di Polres Batang”*, Disertasi Program Doktor Ilmu Kepolisian UI
- Ismail, Chairuddin, 2009, *“Polisi Sipil dan Paradigma Baru Polri”*, Jakarta: Merlyn Press
- Kepolisian Republik Indonesia, *“Polri Yang Dapat Dipercaya Masyarakat”*, Paparan Polisi Presisi
- Undang-undang dan Aturan:
- Peraturan Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia No.99 tahun 2020
- Internet:
- CNN, dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230412071816-12-936528/vonis-sidang-banding-ferdy-sambo-tetap-dihukum-mati> pada 1 Juni 2023
- Tirto, dalam <https://tirto.id/mengurai-lingkaran-setan-kasus-narkoba-yang-melibatkan-polisi-gCHt> pada 1 Juni 2023, Lihat Pula: CNN dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230512151450-12-948808/jaksa-resmi-banding-vonis-seumur-hidup-penjara-irjen-teddy-minahasa> diakses pada 1 Juni 2023
- Detik, Dalam <https://news.detik.com/berita/d-6483348/polri-program-quick-wins-presisi-polri-tercapai-kepercayaan-publik-naik> pada 2 Juni 2023
- Polri.go.id dalam <https://resbuleleng.bali.polri.go.id/survei-indopol-tingkat-kepercayaan-polri-meningkat-jadi-69-35-persen/> diakses pada tanggal 3 Juni 2023
- Tempo, dalam <https://nasional.tempo.co/read/1720486/survei-indikator-politik-indonesia-sebut-tingkat-kepercayaan-publik-terhadap-polri-naik-jadi-732-persen> pada 2 Juni 2023
- CNN, dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210127061723-12-598817/listyo-sigit-prabowo-resmi-dilantik-jadi-kapolri> pada 30 Mei 2023
- Polri.go.id
- bkn.go.id dalam <https://www.bkn.go.id/bkn-serahkan-akreditasi-pada-10-lembaga-penyelenggara-penilaian-kompetensi-instansi-pemerintah/> diakses pada 1 Juni 2023